

SKRIPSI

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
DI INDONESIA**

**Ditulis dan diajukan sebagai syarat untuk mengikuti
Ujian Oral Comprehensive Sarjana Lengkap Pada
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Suska Riau**



Oleh :

LYSIA PUTRI ANDASARI
10673004917

PROGRAM S1

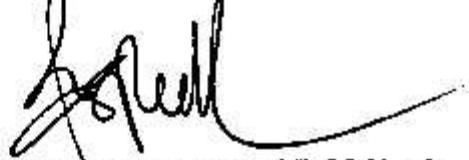
**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LYSIA PUTRI ANDASARI
NIM : 10673004917
JURUSAN : AKUNTANSI S-1
JUDUL : PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR DI INDONESIA

DISETUJUI OLEH,

PEMBIMBING I,



NASRULLAH DJAMIL, SE, M.SI, Ak
NIP. 150. 416. 555

PEMBIMBING II,



DONY MARTIAS, SE, MM
NIP. 150. 424. 336

MENGETAHUI,



Drs. AZWAR HARAHAQ, M.Si
NIP. 195602021984031002

**KETUA JURUSAN
AKUNTANSI S-1**



NASRULLAH DJAMIL, SE, M.SI, Ak
NIP. 150. 416. 555

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : LYSIA PUTRI ANDASARI
NIM : 10673004917
JURUSAN : AKUNTANSI SI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA
HARI/TGL UJIAN : RABU/27 OKTOBER 2010

PANITIA PENGUJI

KETUA



Drs. H. ZAMHARIL YAHYA, MM
NIP. 19520615 08103 1 003

SEKRETARIS



Hj. OECHE NADHIRA, SE, Ak
NIK. 130 403 044

ANGGOTA

PENGUJI I



NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak
NIP. 19780808 200710 1 003

PENGUJI II



RIMET, SE, MM, Ak
NIK. 130 797 014

ABSTRAK

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Oleh : Lysia Putri Andasari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh GCG (ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kepemilikan manajerial) terhadap manajemen laba. Terdapat tiga faktor yang dijadikan sebagai variabel independen dalam penelitian ini yaitu : ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kepemilikan manajerial. Sedangkan yang dijadikan variabel dependen adalah manajemen laba.

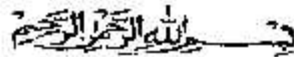
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan (annual report) tahun 2008 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive sampling, berdasarkan metode tersebut maka perusahaan yang terpilih sebagai sampel berjumlah 83 perusahaan manufaktur.

Penelitian ini menggunakan regresi linear dengan menggunakan metode enter, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa hanya terdapat satu variabel independen yang menyatakan pengaruh terhadap variabel dependen yaitu keberadaan komite audit dengan nilai signifikansi probabilitas $0,016 < 0,05$ maka hipotesis kedua diterima yang menyatakan bahwa keberadaan komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan dua variabel independen menyatakan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba yaitu ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit dan kepemilikan manajerial dengan nilai signifikansi probabilitas masing-masing $0,835$ dan $0,831 > 0,05$, maka hipotesis pertama dan ketiga ditolak. Sedangkan hasil pengujian hipotesis secara simultan variabel independen juga tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dengan diperoleh F hitung sebesar $2,061 < F$ tabel sebesar $3,956$, dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,112 > 0,05$.

Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya 7,3% manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kepemilikan manajerial.

Kata Kunci : Ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, kepemilikan manajerial dan manajemen laba.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah dan akan senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini dengan judul "**Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia**". Selanjutnya Shalawat dan Salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW yang senantiasa penulis rindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Skripsi ini ditulis dan diajukan dengan maksud untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Banyak pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Bapak Drs. Azwar Harahap, M. Si, selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau.
2. Bapak Nasrullah Djamil, SE, M. Si, Ak selaku Ketua Jurusan Jurusan Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN

Suska Riau sekaligus sebagai penasehat akademik penulis dan sekaligus sebagai pembimbing I penulis dalam penyelesaian skripsi ini, penulis tidak akan pernah melupakan semua bimbingan dan arahan dari Bapak, baik itu dalam penyelesaian skripsi ataupun dalam perkuliahan sehari-hari.

3. Ibu Desrir Miftah, SE, MM, Ak selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku pembimbing II penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ayahanda Arlis dan Ibunda Sri Rahayu tercinta selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungan dengan ikhlas dan tulus dalam setiap do'anya yang tiada henti untukku.
6. Untuk kedua Adikku tersayang Dwikha Cahyo Pratama dan Adella Arnisyahsari, Pakwo Drs. Mansyur. B, Makwo Asnarti, oi, dan kak ina, yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya selama ini.
7. My special thanks for Dedek yang selalu memberikan support penuh dalam hari-hariku dan selalu menjadi penyemangatku dalam penyusunan skripsi ini yang selalu ada saat dibutuhkan.
8. Teman – teman dekatku Hafit Fahdani (Pak fir), Mardiana (Acik), Efri Yanti, SE (Ibk), Iit Fauziah, SE (Non), dan Yusnidawati, SE yang selalu memberikan support dikala penulis lagi butuh dukungan.

9. Teman-teman yang telah banyak membantu : Islami, Kak Liza, Kak Hardika, Bg Mistri, Bg Cecep, Bg Firman, Bambang Arianto, Yeyen, Yesi, Indah, Vina, dan yang lainnya.
10. Sahabat seperjuangan penulis di Jurusan Akuntansi angkatan '06 khususnya AK/A, yang telah membantu dan meringankan beban penulis dalam pergaulan, perhatian maupun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Co-Op di Telkom Endo, Mimi, Helna, Heni, Rubi, Dina, dan Idris. Sukses buat kita ya guys.
12. Kepada IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) atas semua bantuan datanya kepada penulis.
13. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perubahan karya ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bidang pendidikan pada umumnya.

Billahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalumu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, Mei 2010

Penulis

Lysia Putri Andasari

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA	13
2.1 Teori Keagenan (<i>Theory Agency</i>).....	13
2.2 Manajemen Laba.....	18
2.2.1 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba.....	22
2.3 <i>Good corporate governance (GCG)</i>	23
2.3.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	23
2.3.2 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	26
2.3.3 Manfaat Penerapan <i>Corporate Governance</i>	28
2.3.4 Organ Perusahaan Dalam Pelaksanaan GCG.....	29
2.4 <i>Corporate Governance</i> dengan Manajemen Laba.....	31
2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris.....	32
2.4.2 Keberadaan Komite Audit.....	33
2.4.3 Kepemilikan Manajerial.....	34
2.5 Pandangan Islam tentang GCG dan Manajemen Laba.....	35
2.6 Kerangka Sistematis Model Penelitian.....	39
2.7 Pengembangan Hipotesis.....	39
2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba.....	39
2.7.2 Pengaruh Komite Audit dan Manajemen Laba.....	40
2.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba....	41
2.7.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Keberadaan Komite Audit, serta Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba.....	42

BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sample.....	44
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	45
3.3.1 Variabel Dependen.....	45
3.3.2 Variabel Independen.....	48
3.4 Metode Analisis Data.....	49
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	49
3.4.2 Uji Normalitas Data.....	50
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.5 Pengujian Hipotesis.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Statistik Deskriptif.....	56
4.2 Analisis Data Penelitian.....	62
4.2.1 Analisis Uji Normalitas.....	62
4.2.3 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	65
a) Uji Multikolinearitas.....	65
b) Uji Autokolerasi.....	66
c) Uji Heterokedastisitas.....	67
4.3 Analisa Hasil Penelitian.....	68
4.3.1 Hasil Uji Regresi Secara Parsial.....	70
4.3.2 Hasil Uji Regresi Secara Simultan.....	72
4.3.3 Kocfisien Determinasi.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	77
DAFTARPUSTAKA.....	78

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
II.1 Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	29
II.2 Skema Model Penelitian.....	39
IV.1 P-P Plot Normalitas.....	63
IV.2 Scatterplot Heteroskedastisita.....	67

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
IV.1 Kriteria Perusahaan Manufaktur 2008.....	57
IV.2 Descriptive Statistic.....	61
IV.3 Hasil Uji Normalitas K-S-Z Test.....	64
IV.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	65
IV.5 Hasil Uji Autokolerasi.....	66
IV.6 Hasil Regresi.....	68
IV.7 Hasil Uji F Hitung.....	72
IV.8 Hasil Koefisien Determinasi.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar perusahaan sampel
- Lampiran 2 Deskriptive Statistik
- Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas Data
- Lampiran 4 Hasil Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 5 Hasil Uji Regresi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen & Meckling, 1976 dalam Muh. Arief Ujiyanto & Bambang Agus Pramuka; 2007). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*).

Tindakan *earnings management* telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan Tchrnian, 2006). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan

pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon SB. Bodjono, 2005).

Keinginan dari manajemen untuk memberikan hasil yang maksimal melalui laporan keuangan seringkali membuat manajemen menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan dengan melakukan hal yang merugikan pemilik saham dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga tidak mencerminkan dan menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan dari laporan keuangan seperti dinyatakan dalam kerangka konseptual *financial accounting standards board* (FASB) yaitu untuk memberikan informasi yang berguna untuk mengambil suatu keputusan bisnis. Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen (Schipper dan Vincent, 2003 dalam Gideon SB Bodjono, 2005). Penyampaian informasi melalui laporan keuangan tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang memiliki wewenang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung perusahaan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK) yang digunakan oleh investor, kreditur, supplier, bursa efek dan para analisis keuangan sebagai sumber informasi penting mengenai keberadaan sumber daya ekonomi

perusahaan yang diharapkan berguna untuk pemegang saham dan investor potensial untuk menentukan kepentingan investasi mereka terhadap saham emiten. (Gideon SB. Bodjono, 2005).

Salah satu informasi yang terdapat didalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam *statement of financial accounting concepts* (SFAC) nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif (FASB, 1980 dalam Marhot dan Doddy, 2007). Menurut PSAK nomor 1 informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan dimasa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2004). Bagi pemilik saham atau investor, laba berarti peningkatan nilai ekonomis (*wealth*) yang akan diterima, melalui pembagian deviden. Laba juga digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya dimasa depan.

Fenomena ini menunjukkan terjadinya skandal keuangan merupakan kegagalan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan keuangan. Laba sebagai bagian dari laporan keuangan tidak

menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan menjadi diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya. Kualitas laba khususnya dan kualitas laporan keuangan pada umumnya adalah penting bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan karena untuk tujuan kontrak dan pengambilan keputusan investasi (Schipper dan Vincent, 2003 dalam Gideon SB Bodiono, 2005).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer.

Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd *et al.* (1998) dalam Pratana dan Mas'ud (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Dechow *et*

al. (1996) dan Beasley (1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Menka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan.

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila diambil satu benang merah bahwa diperlukannya suatu tindakan agar kepentingan *Stakeholders* dapat terlindungi, suatu sistem yang dapat mengukur hubungan pihak pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, system itu telah dikenal dalam beberapa tahun terakhir ini dengan sebutan *corporate governance*.

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan

sustainable di sektor korporat. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003).

Penelitian yang mengangkat topik manajemen laba sudah banyak dilakukan baik oleh peneliti luar negeri maupun dalam negeri. Dalam negeri sendiri beberapa diantaranya Boediono (2005) yang meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris terhadap manajemen laba dan kualitas laba, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya kepemilikan institusional yang memberikan pengaruh yang kuat terhadap manajemen laba, dalam bentuk pola dapat dikatakan hasilnya berpengaruh positif. Sedangkan variable yang lain dalam penelitian ini pengaruhnya masih lemah.

Penelitian lainnya, Veronica dan Siddhartama (2005), yang meneliti pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan dan praktik *corporate governance* terhadap pengelolaan laba, memberi hasil yang mendukung penelitian Boediono bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pada penelitian ini, peneliti juga menguji bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh negatif terhadap pengelolaan laba. Hasil penelitian Boediono (2005) serta Veronica (2005) yang sama-sama menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif jelas sekali mendukung hasil penelitian yang dikemukakan oleh Wedari (2004), dimana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Dipihak lain, hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Pranata dan Mas'ud (2003) bertentangan dengan penelitian-penelitian diatas hasilnya menggambarkan bahwa mekanisme *corporate governance* dalam hal kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Tarjo (2008) mendukung hasil ini bahwa kepemilikan berpengaruh negatif.

Ujiyantho dan Bambang (2007) meneliti mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris), manajemen laba dan kinerja keuangan. Dengan objek penelitiannya perusahaan *go public* manufaktur tahun 2002-2004. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, hasil dari penelitian ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Wedari (2004) dimana ia menyatakan kepemilikan manajerial justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Dalam penelitian Ujiyantho dan Bambang (2007) ini juga member hasil lain yang menentang hasil penelitian Boediono (2005) serta Veronica (2005) kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Dilain pihak, Nasution dan Doddy (2007) meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba di industri perbankan Indonesia. Hasil penelitiannya memberikan hasil yang berbeda dari penelitian Ujiyantho dan Bambang (2007) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap

manajemen laba, sedangkan untuk komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ketidak konsisten hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian dengan topik yang serupa masih perlu dilakukan. Mengacu pada ketidak konsintenan hasil penelitian-penelitian tersebut pula yang memberikan alasan terkuat bagi penulis untuk meneliti kembali penelitian yang serupa, tetapi dengan memberikan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu. Dengan perbedaan ini diharapkan memberikan hasil yang lebih baik.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008. Dipilihnya perusahaan manufaktur, dikarenakan sektor usaha inilah yang mendominasi Bursa Efek Indonesia dan dipilihnya tahun penelitian 2008, karena ditahun tersebut kondisi perekonomian cukup stabil, misalnya tidak terdapat dampak politik yang mempengaruhi perekonomian. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi manajemen laba digunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 1995).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil penelitian yang berbeda-beda dari penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul : **"PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA"**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan di muka, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada?
2. Apakah keberadaan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
3. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?
4. Apakah Ukuran dewan komisaris, Keberadaan komite audit, serta Kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh Ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba
2. Pengaruh keberadan Komite Audit terhadap manajemen laba
3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap manajemen laba
4. Pengaruh Ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit serta kepemilikan manajerial secara bersama-sama terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Perusahaan, khususnya mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (Ukuran dewan komisaris, keberadaan Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial) terhadap peningkatan manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Informasi tersebut merupakan *feedback* bagi Perusahaan atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukannya.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepastakaan dan referensi empiris mengenai pengaruh pelaksanaan *Corporate Governance* (Ukuran Dewan Komisaris, keberadaan Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial) di Indonesia, khususnya pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan empiris kepada penulis mengenai pengaruh pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Ukuran Dewan Komisaris, keberadaan Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial) di Indonesia;

khususnya pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur disamping pengetahuan konseptual yang telah penulis miliki.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari *Corporate Governance* dan pengaruhnya terhadap manajemen laba, kajian-kajian penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.



BAB II TELAAH PUSAKA

2.1 Teori Keagenan (*Theory Agency*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* yang menggunakan *agent* untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan control perusahaan. Kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi-spesifikasi apa sajakah harus dilakukan manajer dalam mengelola dana para investor, dan spesifikasi tentang pembagian *return* antara manajer dengan investor. Idealnya antara investor dan manajer sebaiknya menandatangani kontrak yang lengkap atau kompli, yang menspesifikasikan secara tepat apa saja yang akan dilakukan oleh manajer disegala kemungkinan yang terjadi, dan bagaimana laba perusahaan akan dialokasikan. Namun demikian, sebagian besar faktor-faktor kontijensi sulit untuk dilihat dan diramal sebelumnya, sehingga kontrak yang lengkap sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, investor diharuskan untuk memberikan hak pengendalian residual (*residual control right*) kepada manajer, yaitu hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat di kontrak.

Shleifer dan Vishny, 1989 (Deni Darmawati dkk, 2005) mengungkapkan hak pengendalian residual yang dimiliki oleh manajer memungkinkan untuk diselewengkan dan akan menimbulkan masalah keagenan yang dapat diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka

tanamkan tidak dikelola dengan semestinya oleh manajer. Manajer memiliki hak untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian, manajer memiliki hak diskresioner dalam mengelola dana investor. Kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya adalah bahwa manajer dapat melakukan ekspropriasi dana investor.

Ekspropriasi yang dilakukan oleh manajer dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penggelapan dana investor, menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang dimiliki oleh manajer dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar, hingga menjual aset perusahaan lainnya ke perusahaan yang dimiliki oleh manajer. Bahkan yang paling parah, manajer bisa mempertahankan jabatan pekerjaannya meskipun sudah tidak berkompoten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*), yang melakukan pekerjaan.

Menurut Eisenhardt, 1989 (Deni Darmawati dkk; 2005) Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan, yaitu :

1. Masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen.

- Permasalahannya adalah bahwa prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat.
2. Masalah pembagian resiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan persepsi terhadap resiko.

Einsendhardt (1989) dalam Muh. Arief Ujjiyantho dan Bambang Agus Pramuka, 2007 menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
3. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu akan mengutamakan kepentingan pribadinya. Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan selalu diikuti oleh munculnya biaya akibat tidak sinkronnya kepentingan antara pemilik dan pengelola. Biaya tersebut dinamakan *Agency Cost*. Jensen dan Meckling (1976) juga menyebutkan ada tiga jenis biaya keagenan. Biaya monitoring (*monitoring cost*) yang dirancang *principal* untuk membatasi aktivitas menyimpang yang dilakukan oleh agen. Dalam situasi tertentu, agen memungkinkan untuk membelanjakan sumber daya perusahaan (*bonding cost*) untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan prinsipal atau untuk meyakinkan bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan tersebut. Selain itu, nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh

principal juga merupakan biaya yang timbul dari hubungan keagenan. Biaya sejenis ini disebut kerugian residual (*residual loss*) (Deni Darnawati dkk, 2005).

Dalam Teori Keagenan (*agency theory*), seperti kasus perusahaan yang memiliki pemegang saham yang majemuk, permasalahan yang akan muncul bukan saja antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan pengelola (*agent*) saja, melainkan juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dengan makin modernnya sistem korporasi yang salah satunya ditandai dengan makin besarnya skala usaha perusahaan, pola pembiayaan pun makin kompleks. Seiring dengan makin berkembangnya pasar finansial, pemilik perusahaan pun makin anonim. Dalam kasus perusahaan yang menjual kepemilikan, dibursa saham, para pemegang saham menjadi tidak saling kenal. Menurut A. Prasetyantoko, 2008 ada dua tipe dalam permasalahan yang berkaitan dengan *agency theory*, tipe pertama adalah permasalahan yang muncul akibat adanya konflik kepentingan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan. Sedangkan ketegangan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas sebagai masalah keagenan tipe kedua. Dalam kasus perusahaan diberbagai negara di kawasan Asia, sebagaimana pula terjadi di negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalahnya tidak lagi terletak pada masalah keagenan tipe pertama, melainkan tipe kedua yaitu permasalahan antara pemilik saham mayoritas dengan saham minoritas. La Porta dkk, 2000 telah membuktikan bahwa di beberapa negara, ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan para pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) terhadap para pemegang saham minoritas dan para kreditor sangat besar. Pada saat para investor minoritas

mendanai perusahaan, mereka menghadapi resiko dan kadang-kadang besar kemungkinannya bahwa *return* atas investasi yang mereka tanamkan tidak pernah material, karena para manajer dan pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi terhadap mereka.

Ada beberapa mekanisme untuk menekan masalah keagenan, seperti (A. Prasetyantoko, 2008, hlm. 60-62) :

1. Sistem penggajian (*remuneration system*).
Sistem penggajian yang baik diyakini akan menekan sifat oportunistik para pengelola perusahaan. Akhir-akhir ini diterapkan pemberian kepemilikan perusahaan dalam persentase tertentu kepada pengelola perusahaan sebagai salah satu cara menekan masalah keagenan tersebut, sistem tersebut dikenal sebagai *stock option*.
2. Sistem pengawasan internal
Untuk mengawasi jalannya perusahaan yang dilakukan oleh pihak lain, para pemilik modal menugaskan dewan pengawas yang membawahi para pengelola perusahaan dibawah CEO (*Chief Executive Officers*), dalam sistem Anglo-saxon yang menggunakan tata kelola sistem tunggal (*single-tiered system*), dewan pengawas tersebut dinamakan dewan direktur (*board of directors*), sementara dalam sistem ganda (*dual-tiered system*) seperti di Indonesia, dewan pengawas dikenal dengan sebutan Dewan Komisaris (*Commissioner*). Baik dalam sistem yang menggunakan dewan komisaris ataupun dewan direktur, biasanya dewan pengawas terdiri atas pihak dari dalam perusahaan yang mewakili para eksekutif dan pihak luar yang lebih bertugas mewakili kepentingan pemegang saham. Dalam sistem dewan komisaris, wakil pemegang saham minoritas biasanya disebut komisaris independen.
3. Sistem pengawasan eksternal (pasar).
Pengawasan melalui sistem pasar bisa terjadi karena dua sebab. Pertama, kontrol yang dilakukan oleh para investor itu sendiri dengan cara jual beli kepemilikan (saham). Pada dasarnya, baik buruknya kinerja perusahaan akan tercermin dari tinggi rendahnya harga perdagangandi bursa saham. Makin baik kinerja perusahaan, kecenderungannya makin meningkat pula harga sahamnya di bursa. Demikian pula sebaliknya, jika kinerja perusahaan dinilai buruk, para

investor cenderung melepas kepemilikan pada saham tersebut sehingga harga perdagangan sahamnya di bursa merosot. Kedua, kontrol bisa terjadi lewat mekanisme akuisisi yang dilakukan atas alasan keterpaksaan karena kinerja perusahaan cenderung buruk dan sulit diselamatkan sehingga mengundang perusahaan lain untuk mengakuisisi. Mekanisme ini dikenal dengan sebutan *hostile acquisition*.

4. Pasar Eksekutif

Mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap kinerja para eksekutif dalam menjalankan perusahaan terjadi akibat ketatnya persaingan pasar para eksekutif. Semakin tinggi penawaran tenaga kerja di tingkat eksekutif tersebut, akan semakin kuat tekanannya bagi para pengelola perusahaan untuk membuktikan kinerjanya. Jika mereka dinilai tidak memenuhi kriteria kinerja yang baik, para pemilik modal bisa saja memecat dan mengganti mereka dengan pengelola baru. Fenomena ini semakin lazim dengan munculnya jasa pencarian eksekutif kelas tinggi atau perusahaan jasa *head-hunter*. Globalisasi dan mobilitas tenaga kerja antar negara juga meningkatkan persaingan pasar tenaga kerja eksekutif. Misalnya saja, banyak perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan eksekutif dari Filipina, Malaysia, atau Singapura.

5. Konsentrasi Kepemilikan

Dalam berbagai studi ditunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan diyakini akan meningkatkan kontrol terhadap manajer. Hal tersebut sudah menjadi perhatian cukup lama dalam studi-studi klasik (Jensen dan Meckling, 1976) hingga kontemporer (Grossman dan Hart, 1980 & 1998; Shleifer dan Vishny, 1986). Pengawasan dan kontrol melalui konsentrasi kepemilikan dinilai paling baik untuk mengendalikan sifat oportunisme para pengelola perusahaan. Dengan kata lain, konsentrasi kepemilikan akan segera memecahkan masalah keagenan tipe pertama, namun pada saat bersamaan konsentrasi kepemilikan akan segera pula memunculkan konflik kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Manajemen Laba

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan tersebut

diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka. Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau *earning management*.

Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Arie Kurniawan (2009) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

Earnings managements is action of manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase (decrease) in the long term economics profitability of the unit.

Dari defenisi tersebut manajemen laba dapat dipandang sebagai upaya manajer untuk mendapatkan keuntungan pribadi tertentu. Manipulasi dilakukan agar investor tetap tertarik dengan perusahaan tersebut. Standar akuntansi akan memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen untuk memilih dan menggunakan kebijakan dan metode akuntansi tertentu dijadikan alasan oleh pihak manajer untuk melakukan aktivitas manajemen laba.

Beberapa bagian SAK (2002) yang memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba (Resmi, 2003 dalam Elizabeth Debora; 2009), antara lain:

- 1) PSAK No. 14 yang menyatakan bahwa biaya persediaan dapat dihitung dengan identifikasi khusus, masuk pertama keluar pertama (*first in first out*), masuk terakhir keluar pertama (*last in first out*), rata-rata tertimbang (*average*), nilai realisasi bersih dan lain-lain. Penentuan nilai persediaan dapat menggunakan *historical cost* atau *lower of cost or market*.
- 2) PSAK No. 17 yang berisi bahwa manajer bebas menaksir masa manfaat suatu aktiva, menaksir nilai residu dan memilih metode perhitungan penyusutan.
- 3) PSAK No. 20 yang memberikan kebebasan bagi manajer untuk memilih membebaskan biaya riset dan pengembangan sebagai biaya atau dikapitalisasi sebagai aktiva.
- 4) Kerangka Dasar dan Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK memberikan kemungkinan manajer untuk menentukan besar kecilnya piutang tak tertagih, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk manajemen laba yang dilakukan oleh manajer (Scott, 2000 dalam Elizabeth Debora; 2009), lainnya:

a. Taking a bath

Dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan tidak bias dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan.

b. Income Minimization

Dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat dan sebagainya.

c. Income Maximization

Yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang lebih besar. Demikian dengan perusahaan yang mendekati suatu

pelanggaran kontrak hutang jangka panjang. Manajer perusahaan tersebut akan cenderung memaksimalkan laba.

d. Income Smoothing

Merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering dilakukan dan paling populer. Lewat *Income Smoothing*, manajer menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi.

Jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik. Adanya asimetri informasi memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Penelitian Richardson (1999) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan namun peningkatan pengungkapan laporan keuangan akan mengurangi asimetri informasi sehingga peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba dan tingkat pengungkapan laporan keuangan memiliki hubungan yang negatif sejalan

dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Lobo and Zhou (2001) serta Sylvia, Veronica dan Yanivi Bachtiar (2003). Perusahaan yang melakukan manajemen laba akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dalam laporan keuangan agar tindakannya tidak mudah terdeteksi.

2.2.1 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba

Dalam *positif accounting theory* terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986), yaitu

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

2. *Debt Covenant Hypothesis*

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

3. *Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan

segera mengambil tindakan, misalnya: mengenakan peraturan *antitrust*, menaikan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

2.3 *Good Corporate Governance (GCG)*

2.3.1 *Pengertian Good corporate governance (GCG)*

Governance berasal dari bahasa Perancis *Gubernance* yang berarti pengendalian. Kemudian kata tersebut digunakan dalam konteks kegiatan perusahaan sehingga menjadi *corporate governance*. Dalam bahasa Indonesia *corporate governance* diartikan sebagai tata kelola perusahaan.

Good corporate governance didefinisikan oleh Monks dan Minow dalam Darmawati (2005) adalah sebagai hubungan partisipan dalam menentukan arah dan kinerja. *Corporate governance* didefinisikan oleh IICG (*Indonesian institute of Corporate Governance*) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja

Good corporate governance (GCG) Menurut FCGI (2001) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Rahmawati (2006) dalam Yudha Pranata (2007) *good corporate governance* didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness, transparency, accountability* dan *responsibility*, yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen, perusahaan (direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Selain itu, Sejumlah negara juga mempunyai definisi tersendiri tentang GCG. Beberapa negara mendefinisikannya dengan pengertian yang agak mirip walaupun ada sedikit perbedaan istilah. Kelompok negara maju (OECD), umpamanya mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggung jawab pada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholders* lainnya. Karena itu fokus utama disini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency, responsibility, accountability*, dan tentu saja *fairness*.

Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: *accountability, transparency, predictability* dan *participation*. Pengertian lain datang dari *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia*. Menurut lembaga tersebut GCG merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka

panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya.

Menurut Surat Edaran Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawas BUMN No S 106/M.PM. BUMN/2000 dalam Yenita (2007) yang dikutip kembali oleh Nani Puspita (2009), mendefinisikan GCG adalah :

“Segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi perusahaan yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung adanya pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.”

Berdasarkan definisi atau pengertian *good corporate governance* di atas dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya *good corporate governance* adalah mengenai sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Pengertian tentang *corporate governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan; dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan. *good corporate governance* merupakan

kumpulan hukum, peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (FCGI, 2005 dalam Diah Kusuma Wardani, 2008).

2.3.2 Prinsip-prinsip *Good corporate governance*

Pada dasarnya prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG), memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan. Biasanya penerapan prinsip *good corporate governance* di perusahaan, selalu selaras dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri seperti (Diah Kusuma Wardani, 2008) :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah;
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan;
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum

Dari berbagai tujuan tersebut, pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholders* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai.

Pelaksanaan *good corporate governance* dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional (FCGI, 2001 dalam Yudha Pranata, 2007), yaitu:

1. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan,
2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*)
3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan
4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepenulikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*),
5. Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance dalam pedoman umum *good corporate governance Indonesia (2006)*, yaitu :

1. *Transparansi (Transparency)*
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
2. *Akuntabilitas (Accountability)*
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara

benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *Good Corporate Citizen*.
4. *Independensi (Independency)*
Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

2.3.3 Manfaat Penerapan *Corporate Governance*

Yudha Pranata (2007) yang dikutip dari FCGI (2001) menyatakan bahwa dengan pelaksanaan *good corporate governance* diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN.

2.3.4 Organ Perusahaan Dalam Pelaksanaan *Good corporate governance*

Dalam implementasinya untuk pelaksanaan GCG secara efektif, organ perusahaan mempunyai peranan penting dalam secara efektif dalam kegiatan sehari-hari. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan (Pedoman Umum *Good corporate governance* Indonesia, 2006, hlm. 11-17).

Gambar II.1. Struktur Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dalam *Two Tiers System* yang diadopsi oleh Indonesia



Sumber: *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam Seri Tata Kelola Perusahaan jilid II: Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham

tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

2. Dewan Komisaris dan Direksi

Kepengurusan Perusahaan Terbatas di Indonesia menganut sistem dua badan (*two-board system*) yaitu Dewan komisaris dan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan peundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perusahaan.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama

sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

4. Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinir kegiatan Direksi.

2.4 Corporate Governance dengan Manajemen Laba

Konsep *corporate governance* timbul akibat tidak berhasilnya *agency theory* untuk mengurangi tingkat manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen, yang mementingkan diri sendiri dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak *stakeholders* dalam pembagian keuntungan.

Konsep ini diciptakan untuk mengadakan alat control yang memungkinkan adanya system pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi *stakeholders* dan menciptakan efisiensi bagi perusahaan.

Terdapat dua mekanisme dalam penerapan *corporate governance* (Utama dan Afriani, 2005), yaitu:

1. Mekanisme Intern, yaitu mekanisme yang berkaitan dengan pengendalian intern perusahaan khususnya peranan dewan komisaris. Mekanisme intern lainnya yaitu penunjukan dewan direktur dan dewan komisaris independen serta pembentukan komite audit oleh komisaris yang beranggotakan auditor independen dan staf internal audit.
2. Mekanisme Ekstern, yaitu mekanisme control yang memanfaatkan semua perangkat yang ada diluar perusahaan, baik ekonomi, hukum dan social untuk mengatur jalannya perusahaan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Untuk dapat menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik maka didalam sebuah perusahaan diharapkan sedikitnya memiliki beberapa mekanisme *corporate governance* seperti ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kepemilikan manajerial. Dimana satu sama lain saling berkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang berfungsi sebagai pihak yang mengawasi kinerja dewan direksi agar menghasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham, sehingga dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dan pemegang saham.

Jumlah dewan komisaris yang dibutuhkan untuk mengurangi praktik manajemen laba belum dapat diketahui secara pasti. Menurut sudut pandang *resources dependence*, jumlah dewan komisaris yang besar menguntungkan perusahaan (Alexander, Fernell, Halpom, 1993; Goodstein, Gautam, Boeker, 1994; Mintzberg, 1983). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah

bahwa perusahaan akan tergantung kepada dewan komisarisnya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Ukuran dewan komisaris yang kecil akan mempermudah untuk melaksanakan tugas pengawasan dalam perusahaan, demikian dugaan sementara.

2.4.2 Keberadaan Komite Audit

Sistem pengendalian internal merupakan bagian dari praktik GCG. Untuk melakukan system pengendalian ini maka dibentuklah sebuah komite audit yang melakukan fungsi audit internal perusahaan. Yang mana tugasnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan.

Komite audit berbeda dengan audit eksternal yang memeriksa dan memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Komite audit ini berperan untuk mengecek apakah unit lain di dalam perusahaan telah taat menerapkan prosedur, juga berperan aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan GCG dengan melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan, menjaga efektivitas pengendalian, dan melakukan identifikasi dan evaluasi risiko.

Dengan kewenangan, independensi, kompetensi dan komunikasi melalui pertemuan yang rutin dengan pihak-pihak terkait, diharapkan fungsi dan peran dari komite audit lebih bias berjalan dengan efektif sehingga dapat mengidentifikasi kemungkinan adanya praktik manajemen laba yang oportunistik.

Komite audit yang efektif akan meminimalisir tindak manajemen laba oleh manajer. Keberadaan komite audit akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap laporan keuangan. Sehingga diyakini bahwa keberadaan komite audit, akan mengurangi manajemen laba.

Berdasarkan Surat Edaran DEJ, Sc-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari dewan komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari dewan komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan sekaligus ketua komite audit dan anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Marihhot dan Setiawan, 2007)

Tugas komite audit yang diatur dalam Kep-29/PM/2004 antara lain:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
- b) Melakukan penelaahan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
- c) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
- d) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- e) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- f) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.4.3 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ditandai dengan adanya kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajemen yang ikut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Besarnya persentase kepemilikan saham oleh manajer dapat mempengaruhi tindakan mereka dalam mengambil keputusan. Boediono

(2005) menyebutkan, secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Hal ini dikarenakan adanya motivasi yang berbeda disaat pengelola juga sebagai pemilik.

2.5 Pandangan Islam tentang GCG dan Manajemen Laba

Islam adalah agama yang diridhoi dan disempurnakan oleh Allah SWT, artinya islam bukan hanya agama yang mengatur tentang ibadah saja, akan tetapi semua aspek kehidupan manusia juga diatur dalamnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an yang merupakan kitab suci Agama Islam. Dalam Al-Qur'an semua hal tentang kehidupan mulai dari *Hablum Minallah* (hubungan antara makhluk dengan Allah SWT) sampai kepada *Hablum Minannaas* (hubungan antara sesama manusia) juga diatur dalam Al-Qur'an.

Begitu juga dengan GCG atau yang merupakan tata kelola perusahaan yang baik sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pemilik saham ataupun *shareholder* perusahaan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dalam memimpin baik itu memimpin Negara, ataupun perusahaan haruslah dengan adil dan jangan

mengikuti hawa nafsu. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S : Shaad : 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah atau pemimpin di Bumi. Termasuk dalam hal memimpin sebuah perusahaan. Dari ayat tersebut juga dijelaskan bahwa dalam memimpin harus bersikap adil dan tidak mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu hanya akan menyesatkan kita dari Allah SWT.

Selain itu, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang kita untuk memakan harta yang tidak halal dan bukan hak kita, tujuan dari GCG sendiri adalah untuk melindungi kepentingan dari pemilik modal dari kecurangan-kecurangan yang mungkin akan dilakukan oleh manajemen. Kecurangan-

kecurangan itu tujuannya pastilah untuk mendapatkan sesuatu yang bukan merupakan hak dari manajemen. Dalam Q.S : An-Nisa' : 29 yang berbunyi

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَسُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dibenarkan memakan yang bukan menjadi hak kita, oleh karena itu dalam perusahaan, manajemen haruslah transparan dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan demi kepentingan mereka dan mengorbankan kepentingan dari pemilik modal.

Selain itu, islam juga menganjurkan untuk mencari rezeki yang telah disiapkan oleh Allah SWT di muka bumi. Dalam perusahaan, untuk memperoleh hasil yang maksimal harus diupayakan usaha yang optimal. Untuk memperoleh laba yang baik haruslah dilakukan upaya-upaya yang maksimal. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S : Al-Jumu'ah : 9-10 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
 ٱللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ٱللَّهِ وَاذْكُرُوا
 ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٥﴾

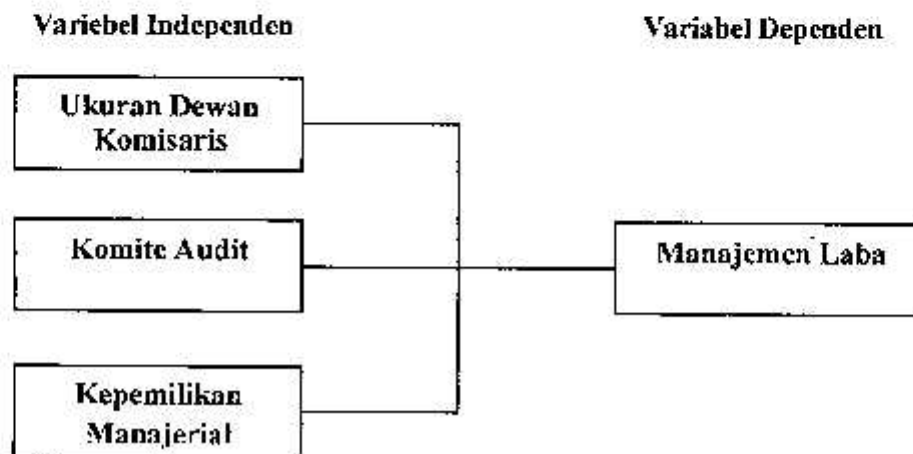
Artinya : “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa di muka bumi ini telah disediakan rezeki dan karunia Allah SWT untuk manusia, oleh karena itu kita disuruh berusaha untuk mendapatkannya. Dalam hal perusahaan, jika ingin mendapatkan hasil yang optimal dengan meraih laba yang maksimal yang juga akan meningkatkan profitabilitas, adalah dengan cara berusaha semaksimal mungkin dengan memperhatikan dan menerapkan konsep GCG dalam kehidupan operasional perusahaan sehingga nantinya akan berdampak pada minimalnya praktik manajemen laba perusahaan dan berimbang pada tingginya maksimal informasi internal perusahaan yang diperoleh dan akhirnya berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan pemilik modal kepada manajemen.

2.5 Kerangka Skematis Model Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka bisa dibuat suatu kerangka teoritis yang digambarkan dalam bentuk diagram skematik pada gambar berikut :

Gambar 11.2 Skema Model Penelitian



2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Penelitian Zhou dan Chen (2004) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap *earnings management* yang diukur dengan menggunakan *Loan loss provisions*. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal yang sama yaitu makin banyak dewan komisaris maka pembatasan atas tindak manajemen laba dapat dilakukan lebih efektif.

Penelitian Mdiastuty dan Masfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan dengan tanda

positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dari pernyataan ini, diajukan hipotesis bahwa:

H_1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba

2.7.2 Pengaruh Komite Audit dan Manajemen Laba

Di Indonesia komite audit merupakan salah satu komite yang berperan penting dalam pelaksanaan *corporate governance*. Dewan komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, system pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2000). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah sebagai berikut: pertama, dalam hal penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit ekstern. Kedua, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan manajemen laba yang ingin dicoba oleh manajemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2004) menemukan bahwa *discretionary accrual* pada perusahaan yang tidak mempunyai komite audit signifikan lebih tinggi dibandingkan pada perusahaan yang memiliki komite audit. Dari pernyataan ini, diajukan hipotesis bahwa:

H_2 : Keberadaan komite audit independen berpengaruh terhadap manajemen laba

2.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005).

Warfield et al., (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan discretionary accruals sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam laba. Hasil yang sama juga diperoleh Jensen dan Meckling (1976). Selanjutnya pada penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.7.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Keberadaan Komite Audit, serta Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyaknya dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yaermack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) juga menyatakan hal yang sama. Penelitian

Midiastuty dan Masfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal tersebut menunjukkan hubungan yang positif. Dimana semakin besar ukuran dewan komisaris dalam sebuah perusahaan maka semakin banyak manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan.

Selain ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Keberadaan komite audit independen akan memberikan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* yang baik penting dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan manajemen laba oleh manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2004) menemukan bahwa *discretionary accrual* pada perusahaan yang tidak mempunyai komite audit signifikan lebih tinggi dibandingkan pada perusahaan yang memiliki komite audit.

Perusahaan yang dipimpin oleh manajer yang tidak sebagai pemegang saham akan menimbulkan motivasi untuk melakukan manajemen laba. Secara umum dapat dikatakan persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Pemikiran ini didukung hasil penelitian Dhaliwal et al. (1982), Morck et al. (1988), Warfield et al. (1995); Gabrielsen, et al. (2002), dan Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Mahfoedz (2003). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa perusahaan yang dikelola oleh manajer dan memiliki persentase tertentu saham perusahaan

dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba dan menunjukkan hubungan yang positif.

Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan mempunyai pengaruh signifikan yang lebih dominan dalam memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat meningkatkan kepentingan kepemilikan manajer bahkan dapat disejajarkan dengan kepemilikan pemegang saham. Hal ini sesuai dengan Jensen dan Meckling (1976) dan Morck et al, (1998), dimana kepentingan manajer dan pemegang saham akan dapat diselaraskan bila manajer memiliki saham perusahaan yang lebih besar.

H_4 : Ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kepemilikan Manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2008.

Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang diteliti (Indriantoro, 2002: 115). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu teknik sampling dengan menggunakan pertimbangan dan batasan tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang relevan dengan tujuan penelitian dan representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008.
2. Perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 Desember 2008, yang dinyatakan dalam rupiah (Rp).
3. Perusahaan dibatasi pada perusahaan yang memiliki data mengenai ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial.
4. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 31 Desember 2008), baik data mengenai *corporate governance* perusahaan, dan data yang diperlukan untuk mendeteksi manajemen laba.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008 yang bisa dilihat dalam *Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo, 2002). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial data *discretionary* dan *non discretionary accrual* yang diperoleh dari Direktorat Pasar Modal Indonesia di Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) cabang pekanbaru.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yaitu suatu campur tangan manajemen dengan maksud tertentu dalam proses penentuan laba yang biasanya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri (Schipper (2003) dalam Elizabeth Debora, 2009).

Berdasarkan banyaknya penelitian terdahulu, ukuran ada atau tidaknya praktik manajemen laba dalam penelitian ini juga diukur dengan akrual diskresi

yang merupakan selisih antara akrual total dan akrual nondiskresi. Jika akrual diskresi bernilai negatif maka berarti perusahaan melakukan *income decreasing earning management* yaitu manajemen laba yang bertujuan untuk menurunkan laba yang dilaporkan. Dan sebaliknya jika nilai akrual diskresi positif, berarti perusahaan melakukan *income increasing discretionary accrual*, yaitu manajemen laba yang ditujukan untuk menaikkan laba yang dilaporkan. Perhitungan besarnya akrual diskresi dilakukan dengan tiga langkah, yaitu:

a. Menghitung akrual total (*total accruals*)

Total akrual yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan data arus kas dari aktivitas operasi yang langsung diambil dari laporan arus kas. Dengan pendekatan laporan arus kas maka total akrual dihitung sebagai berikut:

$$TACC_{it} = EBXT_{it} - OCF_{it}$$

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i untuk periode t

$EBXT_{it}$ = Laba perusahaan i sebelum pos-pos luar biasa operasi yang dihentikan untuk periode t

OCF_{it} = *Operating cash flow* perusahaan i untuk periode t

b. Menghitung akrual nondiskresi (*nondiscretionary accruals*)

Untuk melihat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan, nilai total akrual selanjutnya dibedakan menjadi akrual non diskresi dan akrual diskresi. Jones (1991) menunuskan suatu model untuk membagi total akrual menjadi *nondiscretionary* dan *discretionary accrual*. Model ini ditujukan untuk menghitung akrual yang diharapkan terjadi seiring dengan berubahnya aktivitas operasional perusahaan yaitu *nondiscretionary accrual*. Selisih antara total akrual

dengan *nondiscretionary accrual* akan menggambarkan *discretionary accrual* atau akrual yang dengan sengaja diterapkan manajemen untuk tujuan tertentu.

Didalam penelitian ini *total accrual* diukur dengan menggunakan model Jones (1991), yaitu:

$$TACC_{it} = \alpha_1 (1/TA_{i,t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) + \alpha_3 PPE_{it} + \varepsilon_{it}$$

- $TACC_{it}$ = Total akrual untuk perusahaan i pada tahun t, dibagi total Asset untuk perusahaan i pada akhir tahun t-1
- $TA_{i,t-1}$ = Total aset untuk perusahaan i pada akhir tahun t-1
- ΔREV_{it} = Perubahan dalam pendapatan untuk perusahaan i pada tahun t, dibagi total asset untuk perusahaan i pada akhir tahun t-1
- ΔREC_{it} = Perubahan dalam piutang bersih untuk perusahaan i pada tahun t, dibagi total asset untuk perusahaan i pada akhir tahun t-1
- PPE_{it} = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t dibagi total asset perusahaan i pada akhir tahun t-1

Persamaan akrual total diatas diestimasi dengan metode *ordinary least square* (OLS) yaitu sebuah model regresi yang mencakup lebih dari satu variable bebas. Estimasi α_1 , α_2 , α_3 didapat dari regresi OLS tersebut dan digunakan untuk menghitung *nondiscretionary accruals* sebagai berikut:

$$NDACC_{it} = \alpha_1 (1/TA_{i,t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) + \alpha_3 PPE_{it} + \varepsilon_{it}$$

c. Menghitung akrual diskresi (*discretionary accruals*)

Dan akhirnya, *discretionary accruals* diestimasi dengan cara sebagai berikut:

$$DACC_{it} = TACC_{it} - NDACC_{it}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Beiner *et al.*, 2003), yang berasal dari eksternal atau luar perusahaan sampel terhadap keseluruhan anggota dewan.

$$\text{Ukuran dewan komisaris} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen} \times 100\%}{\text{Jumlah Total Dewan Komisaris}}$$

2. Komite Audit

Keberadaan komite audit diharapkan mampu mengurangi potensi terjadinya kecurangan, baik terhadap operasi perusahaan maupun laporan keuangan. Namun, Penunjukan komite audit oleh dewan direksi menyebabkan turunnya independensi audit yang dilakukan oleh auditor itu sendiri. Oleh sebab itu, keberadaan auditor independent dengan performance yang baik diharapkan dapat meminimalkan kelemahan tersebut (Wardani 2006). Dalam penelitian ini keberadaan komite audit yang ideal dinilai berdasarkan aturan *board governance* yang dikeluarkan oleh pihak regulator yang diukur dengan variabel *dummy*, yang terbagi atas:

- a. Komite audit telah terbentuk, beranggotakan minimal tiga orang yang salah satunya adalah komisaris independen yang berperan juga sebagai ketua. Salah seorang anggotanya memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan atau keuangan, diberi nilai 1.
- b. Komite audit belum terbentuk dan atau belum memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak regulator, diberi nilai 0.

3. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dalam saham merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan, karena kepemilikan manajer akan mensejajarkan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah saham beredar. Indikatornya adalah persentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari total saham beredar.

$$\text{Kepemilikan manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham milik manajemen}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Penelitian ini merupakan studi empiris (*empirical study*) yaitu study tentang fakta/data yang nyata yang dikumpulkan dan diuji secara sistematis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data silang tempat (*Cross-section*) yaitu data yang dikumpulkan pada satu titik waktu dan pengamatan dilakukan pada individu yang berada pada saat yang sama.

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:170) Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan dalam penelitian.

3.4.2 Uji Normalitas Data

Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis *multivariate*. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Jika variasi yang dihasilkan dalam distribusi data tidak normal maka test statistic yang dihasilkan tidak valid.

Pengujian normalitas penelitian ini dilakukan pada model regresi dengan dua jenis pengujian yaitu pengujian analisis grafik dengan menggunakan *normal probability plot*. Dimana jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dan pengujian analisis statistik dengan menggunakan uji K-S-Z (*Kolmogorov-Smirnov*), uji ini akan menunjukkan hasil normal jika tingkat signifikan yang diperoleh > 0.05 , jika sebaliknya berarti data terdistribusi tidak normal. (Imam Ghozali, 2007:114-115).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi maka variable-variabel yang menjelaskan model menjadi tidak efisien.

a) Uji Multikolinearitas

Suatu model regresi mengandung multikolinearitas jika ada hubungan yang sempurna antara variable independen atau terdapat korelasi linear. Konsekuensinya adalah bahwa kesalahan standar estimasi akan cenderung meningkat dengan bertambahnya variable independen, tingkat signifikansi yang digunakan untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar, dan probabilitas menerima hipotesis yang salah juga semakin besar. Sehingga model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir nilai variable independen.

Dengan bantuan software SPSS, deteksi multikolinearitas menggunakan *Variance Inflation Factor* atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi dengan formula sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2)} = \frac{1}{\text{Tolerance}}$$

Default SPSS bagi angka *tolerance* adalah 0,0001. Jika nilai VIF lebih besar dari 5 maka variable tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variable bebas yang lainnya, sebaliknya jika nilai $VIF < 5$ maka dianggap tidak terdapat multikolinearitas.

b) Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi bila ada korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi adanya autokorelasi ini adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variable dependen pada nilai variable independen tertentu.

Suatu jenis pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi telah dikembangkan oleh J. Durbin dan G. Watson yang dikenal dengan statistic *d* Durbin Watson dengan rumus:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Keterangan:

- e_t : kesalahan gangguan dari sampel
 e_{t-1} : kesalahan gangguan dari sampel satu periode sebelumnya

Ketentuan:

1. Jika angka DW dibawah -2, berarti terdapat autokolerasi positif
2. Jika angka DW diantara -2 sampai 2, berarti tidak terjadi autokolerasi
3. Jika angka DW diatas 2, berarti ada autokolerasi negatif

c) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian yang dilakukan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot. Jika scatterplot menunjukkan adanya pola tertentu maka terdapat heteroskedastisitas. Jika titik-titiknya menyebar atau tidak membentuk suatu pola serta data menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

3.5 Pengujian Hipotesis

1) Model Analisis

Analisis statistic deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dari variable-variabel yang diteliti. Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik (*normality, multicollinearity, dan heterokedasistitas*). Pengujian Hipotesis pengaruh mekanisme *corporate Governance* terhadap manajemen laba ($H_1 + H_2$ dan H_3) digunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut:

$$DACC_{it} = \alpha + \beta_1 UDK + \beta_2 KKA + \beta_3 KM + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

α	:	konstanta
β	:	koefisien regresi
$DACC_{it}$:	<i>discretionary accruals</i> menggunakan model Jones (1991)
UDK	:	ukuran dewan komisaris
KKA	:	keberadaan komite audit
KM	:	kepemilikan manajerial
ε	:	koefisien <i>error</i>

Untuk penelitian ini pengujian akan dilakukan melalui tiga tahapan:

I. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variable independent secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap variable dependen. Analisis uji F

dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{table} . Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis:

Jika $F_{hitung} < F_{table}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Jika $F_{hitung} > F_{table}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Uji t

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variable independen secara individual dalam menerangkan variable dependen. Dengan menguji koefisien variable independen atau uji parsial untuk semua variable independen. Uji t ini membandingkan t_{hitung} dengan t_{table} yaitu bila $t_{hitung} > t_{table}$ berarti bahwa variable bebas mampu mempunyai pengaruh terhadap variable terikat. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{table}$ maka variable bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variable terikat, dalam hal ini tingkat kepercayaan α sebesar 0,05 (5%).

3. Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variable bebas mampu menjelaskan bersama-sama variable terikat atau seberapa baik model regresi yang telah dibuat tersebut cocok dengan data. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variable bebas dalam menjelaskan variable terikat.

Untuk mengetahui variable bebas mana yang paling berpengaruh terhadap variable terikatnya dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel bebas yang saling berpengaruh terhadap variable terikat dilihat dari koefisien korelasi parsial yang paling besar. Nilai koefisien determinasi akan berkisar 0 sampai 1, apabila nilai koefisien determinasi = 1 menunjukkan 100% total variasi diterangkan

oleh varian persamaan regresi, atau variable bebas mampu menerangkan variable Y sebesar 100%. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi = 0 menunjukkan bahwa tidak ada total varians yang diterangkan oleh varian bebas (Suhardi & Purwanto, 2004).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengolahan data dalam menguji hipotesis yang diajukan peneliti dan pembahasan hasil analisa data tersebut. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah hipotesis-hipotesis yang diajukan penulis dapat diterima atau tidak. Analisis pertama kali dilakukan adalah menentukan besarnya ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan manajemen laba masing-masing perusahaan berdasarkan data yang diperoleh.

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. Sedangkan analisis deskriptif merupakan analisis yang menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada variabel-variabel penelitian untuk mendukung hasil analisis statistik. Hipotesis-hipotesis yang ada diuji dengan metode regresi berganda, uji t, dan uji f. Kemudian koefisien determinasi untuk mendeteksi persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4.1 Statistik Deskriptif

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008 dan perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan

(*annual report*) untuk periode 31 Desember 2008, yang dinyatakan dalam rupiah. Berdasarkan kriteria tersebut, dari 139 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2008, maka perusahaan yang terpilih sebagai sampel berjumlah 83 perusahaan saja yang memenuhi kriteria penelitian yaitu terdiri dari :

Tabel IV.1 Daftar Perusahaan Manufaktur Tahun 2008

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN
1	AAJI	(Astra Agro Lestari)
2	ACES	(Ace Hardware)
3	ADES	(Ades Alfindo Putrasetia)
4	ADHI	(Adhi Karya)
5	AKPI	(Argha Karya Prima Industri)
6	ALMI	(Alumindo Light Metal Industry)
7	AMFG	(Asahimas Flat Glass)
8	APLI	(Asiaplast Industri)
9	AQUA	(Aqua Golden)
10	ASGR	(Astra Graphia)
11	ASII	(Astra International)
12	AUTO	(Astra Otoparts)
13	BATA	(Sepatu BATA)
14	BRAM	(Branta Mulia)
15	BRPT	(Barito Pacific)
16	CNTX	(Cennury Textile)
17	COWL	(Cowell Development)

18	CTBN	(Citra Tubindo)
19	DNKS	(Dankos Laboratories)
20	DOID	(Delta Dunia Petroindo)
21	DVLA	(Darya Varia Laboratoria)
22	DYNA	(Dynaplast)
23	EKAD	(Eka Dharma Tape)
24	ESTI	(Evershine)
25	FASW	(Fajar Surya Wisesa)
26	GDYR	(Good Year Indonesia)
27	GGRM	(Gudang Garam)
28	GJTL	(Gajah Tunggal)
29	HDTX	(Panasia Indosyntec)
30	HEXA	(Hexindo Adiperkasa)
31	IIKP	(Inti Indah Karya Plasindo)
32	IKAI	(Intikeramik Alamasari)
33	IKBI	(Sumi Indo Kabel)
34	IMAS	(Indomobil Sukses)
35	INAF	(Indofarma)
36	INCI	(Intanwijaya International)
37	INDF	(Indofood Sukses Makmur)
38	INDR	(Indorama Syntetic)
39	INDS	(Indospring)
40	INTD	(Inter Delta)
41	INTP	(Indocement)

42	JPRS	(Jaya Pari Steel)
43	KAEF	(Kimia farma)
44	KARW	(Karwell Indonesia)
45	KBLM	(Kabelindo Murni)
46	KDSI	(Kedawung Setia)
47	KLBF	(Kalbe Farma)
48	KONI	(Perdana Bangun Pusaka)
49	LION	(Lion Metal)
50	LMPI	(Langgeng Makmur)
51	LMSH	(Lionmesh Prima)
52	LPIN	(Multi Prima Indonesia)
53	L'LS	(Lautan Luas)
54	MLBI	(Multi Bintang)
55	MLPL	(Multi Polar)
56	MRAT	(Mustika Ratu)
57	MTDL	(Metrodata Electronik)
58	NIPS	(Nipress)
59	PAFI	(Panasia Filament Inti)
60	POLY	(Polysindo Eka Perkasa)
61	PRAS	(Prima Alloy Steel)
62	PSDN	(Prasidha Aneka Niaga)
63	PYFA	(Prydan Farma)
64	RDTX	(Roda Vivatex)
65	SAIP	(Srby Agung Industri Pulp & Kertas)

66	SCPI	(Schering Plough Indonesia)
67	SKLT	(Sekar Laut)
68	SMCB	(Semen Cibinong)
69	SMGR	(Semen Gresik)
70	SMSM	(Selamat Sempurna)
71	SOBI	(Sorini Corporation)
72	SPMA	(Suparma)
73	SRSN	(Sarasa Nugraha)
74	STTP	(Siantar Top)
75	TBLA	(Tunas Baru Lampung)
76	TBMS	(Tembaga Mulia Semanan)
77	TCID	(Mandom Indonesia)
78	TFCO	(Tifico)
79	TIRT	(Tirta Mahakam)
80	TOTO	(Surya Toto Indonesia)
81	TURI	(Tunas Ridcan)
82	UNIC	(Unggul Indah Cahaya)
83	UNTR	(United Tractor)

Sumber : *Indonesia Capital Market Directory 2008*

Dari 83 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian, kemudian dilakukan analisis deskriptif data yaitu menjelaskan deskripsi data dari seluruh variabel yang akan dimasukkan dalam model penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2 Statistik Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean
Manajemen_Laba	83	-763172	744067	-72005,90
Dewan_Komisaris	83	0,20	0,70	0,36
Komite_Audit	83	0,00	1,00	0,53
Kepemilikan_Manajerial	83	0,01	0,99	0,64

Sumber : Lampiran 1

Analisis deskriptif terhadap variabel manajemen laba menunjukkan bahwa, dari 83 buah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian terlihat bahwa pada variabel ini memiliki nilai minimum sebesar -763172 sedangkan nilai maksimum sebesar 744067 artinya terdapat selisih sebesar 1507239 dengan nilai rata-rata sebesar -72005,90.

Analisis deskriptif terhadap variabel ukuran dewan komisaris menunjukkan bahwa, dari 83 buah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian terlihat bahwa pada variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,20 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,70 artinya terdapat selisih sebesar 0,50. Nilai rata-rata sebesar 0,36 artinya dari 83 perusahaan tersebut nilai ukuran dewan komisaris mengalami peningkatan rata-rata sebesar 36%.

Analisis deskriptif terhadap variabel komite audit menunjukkan bahwa, dari 83 buah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian terlihat bahwa pada variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0 sedangkan nilai maksimum sebesar 1 artinya terdapat selisih sebesar 1. Nilai rata-rata sebesar 0,53 artinya dari 83

perusahaan tersebut nilai komite audit mengalami peningkatan rata-rata sebesar lebih dari 53%.

Analisis deskriptif terhadap variabel kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa, dari 83 buah perusahaan yang dijadikan sampel penelitian terlihat bahwa pada variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,01 sedangkan nilai maksimum sebesar 0,99 artinya terdapat selisih sebesar 0,99. Nilai rata-rata sebesar 0,64 artinya dari 83 perusahaan tersebut nilai kepemilikan manajerial mengalami peningkatan rata-rata sebesar lebih dari 64%.

4.2 Analisis Data Penelitian

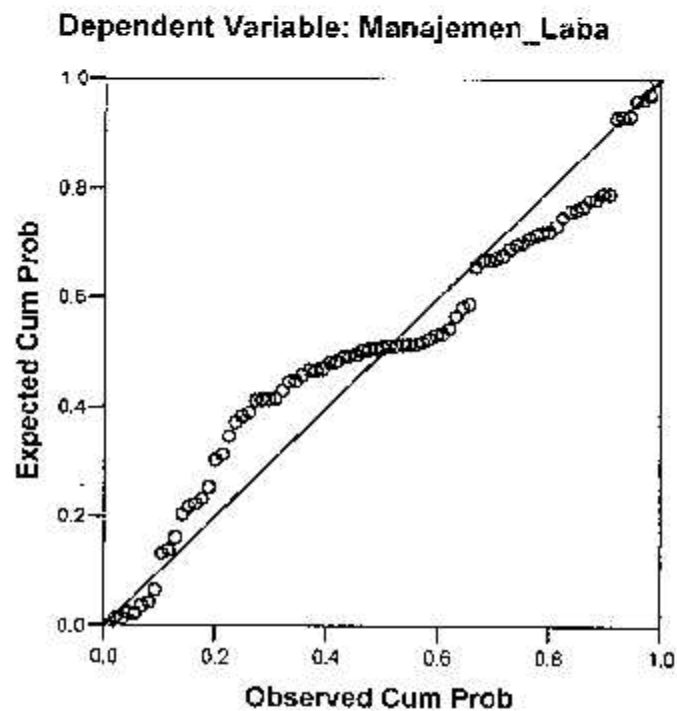
4.2.1 Analisis Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis *multivariate* khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal. Deteksi normalitas dilihat dengan menggunakan grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Pada gambar terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada gambar IV.1.

Gambar IV.1

Diagram P-P Plot Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Lampiran 2

Pada gambar IV.1 terlihat bahwa grafik normal P-P Plot of Regression Standarized Residual terlihat titik-titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data juga menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi

secara normal (Ghozali, 2007:30). Hasil uji Normalitas disajikan sebagai berikut terlihat pada tabel IV.3 dibawah.

Tabel IV.3 Hasil Uji Normalitas K-S-Z Test

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Manajemen_ Laba	Dewan_ Komisaris	Komite Audit	Kepemilikan_ Manajerial
N		83	83	83	83
Normal Parameter ^{a,b}	Mean	-72005,90	,3639	,5301	,6351
	Std. Deviation	219674,657	,13106	,50213	,26947
Most Extreme Differences	Absolute	,182	,313	,355	,139
	Positive	,182	,313	,324	,108
	Negative	-,163	-,120	-,355	-,139
Kolmogorov-Smirnov Z		1,663	2,849	3,238	1,269
Asymp. Sig. (2-tailed)		,008	,000	,000	,080

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran 2

Tabel IV.3 menunjukkan nilai K-S-Z untuk variabel manajemen laba adalah sebesar 1,663 dengan signifikansi sebesar 0,008. Nilai K-S-Z untuk variabel ukuran dewan komisaris adalah sebesar 2,849 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai K-S-Z untuk variabel komite audit adalah sebesar 3,238 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai K-S-Z untuk variabel kepemilikan manajerial adalah sebesar 1,269 dengan signifikansi sebesar 0,080.

Nilai K-S-Z semua variabel tersebut diatas 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel secara statistik telah terdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian. Meskipun pada grafik normal *P-P Plot of Regression Standardized Residual* diatas terlihat titik-titik tidak menyebarkan di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya tidak mengikuti arah garis diagonal,

tetapi dengan dukungan uji *Kolmogorov-Smirnov* maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.2.2 Analisis Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi terdapat kolerasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan bebas Multikolinearitas jika Variance Inflation Factor (VIF) disekitar angka 1, dan mempunyai angka tolerance mendekati 1. Jika kolerasi antar variabel independen lemah (di bawah 0,5) maka dapat dikatakan bebas multikolinearitas, data yang baik dapat dikatakan bebas multikonearitas. Hasil Uji Multikonearitas disimpulkan seperti pada tabel IV.4 dibawah.

Tabel IV.4 Hasil Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF	Keterangan
Dewan_Komisaris	0,978	1,022	BEBAS
Komite_Audit	0,997	1,003	BEBAS
Kepemilikan_Manajerial	0,981	1,019	BEBAS

Sumber : Lampiran 3

Pada tabel IV.4 terlihat bahwa variabel ukuran dewan komisaris mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,978 dan nilai VIF 1,022, variabel komite audit mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,997 dan nilai VIF 1,003 dan variabel kepemilikan manajerial mempunyai nilai Tolerance sebesar 0,981 dan nilai VIF 1,019. Dikarenakan nilai VIF di sekitar angka 1 dan memiliki tolerance mendekati

angka 1, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen, sehingga dapat diputuskan ketiga variabel bebas dari multikolinearitas dan layak digunakan.

b) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi Autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Secara umum bisa diambil patokan :

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada Autokorelasi positif
2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
3. Angka D-W di atas +2 berarti ada Autokorelasi negatif

Tabel IV.5 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,269 ^a	,073	,037	215531,970	2,275

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Manajerial, Komite_Audit, Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: Manajemen_Laba

Sumber : Lampiran 3

Pada tabel IV.5 terlihat bahwa angka Durbin Watson di atas 2 yaitu sebesar 2,275 yang berarti ada autokorelasi negatif. Meskipun terdapat autokorelasi namun autokorelasi dinilai bebas karena hanya terdapat autokorelasi secara negatif.

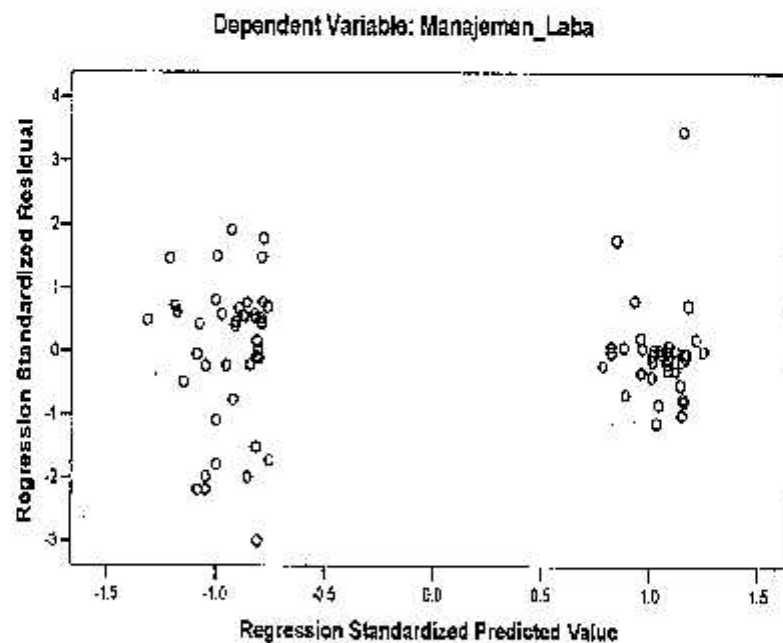
c) Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y (Santoso, 2001: 210). Seperti terlihat pada gambar IV.2 dibawah.

Gambar IV.2

Diagram Scatterplot Heteroskedastisitas

Scatterplot



Sumber : Lampiran 3

Pada Gambar IV.2 terlihat pola yang jelas karena titik-titik menumpuk pada sisi kanan dan kiri gambar, tapi meskipun demikian titik-titik tersebut berada diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.3 Analisa Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan regresi linear, dilakukan dengan menggunakan metode enter, dimana semua variabel dimasukkan untuk mencari pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui meregresikan *manajemen laba* sebagai dependen terhadap ukuran dewan, komisaris, komite audit dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Hasil pengujian hipotesis seperti yang tercantum dalam tabel IV.6 di bawah ini.

Tabel IV.6 Hasil Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-8488,07	8401,68		-0,086	0,931
Dewan_Komisaris	-38465,4	183622,6	-0,023	-0,209	0,835
Komite_Audit	-116333	47477,65	-0,266	-2,450	0,016
Kepemilikan_Manajerial	19128,94	89170,9	0,023	0,215	0,831

Sumber : Lampiran 4

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

$$DAAC_{it} = \beta_0 + \beta_1 UDK_{it} + \beta_2 KKA_{it} + \beta_3 KM_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$DAAC_{it} (\text{manajemen laba}) = -8488,07 - 38465,4 UDK_{it} - 116333 KKA_{it} + 19128,94 KM_{it} + \varepsilon_{it}$$

1. Konstanta sebesar -8488,07, artinya : jika nilai variabel ukuran dewan komisaris (X1), komite audit (X2) dan kepemilikan manajerial (X3) nilainya adalah 0, maka manajemen laba (Y) nilainya adalah -8488,07.
2. Koefisien regresi variabel ukuran dewan komisaris (X1) sebesar -38465,4, artinya : jika variabel lainnya tetap dan ukuran dewan komisaris menurun, satu-satuan maka manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar 38.465,4 poin. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba, semakin menurun ukuran dewan komisaris maka akan semakin rendah manajemen laba.
3. Koefisien regresi variabel komite audit (X2) sebesar -116333, artinya : jika variabel lainnya tetap dan komite audit meurun, satu-satuan maka manajemen laba akan mengalami penurunan sebesar 116.333 poin. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara komite audit dengan manajemen laba, semakin menurun komite audit maka akan semakin rendah manajemen laba.
4. Koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial (X3) sebesar 19128,94, artinya : jika variabel lainnya tetap dan kepemilikan manajerial meningkat, satu-satuan maka manajemen laba akan mengalami peningkatan sebesar

19.128,94 poin. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba, semakin meningkat kepemilikan manajerial maka akan semakin tinggi manajemen laba.

4.3.1 Hasil Uji Regresi Secara Parsial

a) H_1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pada tabel IV.6 diatas terlihat bahwa berdasarkan statistik t tabel sebesar 1,663 > t hitung sebesar -0,209 dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,835 > 0,05 maka H_1 DITOLAK. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba.

Ukuran dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional perusahaan dan dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dan proses penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari kecurangan pelaporan keuangan. Namun dengan ditolaknya hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan bahwa komposisi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan tidak dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang ditunjukkan dengan nilai signifikan probabilitas > 0,05.

b) H_2 : Keberadaan Komite Audit Independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pada tabel IV.6 diatas terlihat bahwa berdasarkan statistik t tabel sebesar 1,663 > t hitung sebesar -2,450 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,016 <

0,05 maka H_2 DITERIMA. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba.

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit dinilai akan mampu meredam potensi terjadinya kecurangan baik terhadap operasi perusahaan maupun laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan manajemen laba melalui akrual diskresioner. Namun dengan diterimanya hipotesis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap manajemen laba. Hal ini dibuktikan bahwa komite audit dinilai telah mampu meredam potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan sehingga mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang ditunjukkan dengan nilai signifikan probabilitas sebesar $0,16 < 0,05$.

c) H_3 : **Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.**

Pada tabel IV.6 diatas terlihat bahwa berdasarkan statistik t tabel sebesar $1,663 > t$ hitung sebesar 0,215 dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,831 > 0,05$ maka H_3 DITOLAK. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba.

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gidcon, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Dengan ditolaknya hipotesis diatas, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan bahwa persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar tidak bisa mengurangi masalah ketidaksielarasan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan yang dapat mendasari manajemen untuk melakukan manajemen laba. Ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikan probabilitas $> 0,05$.

4.3.2 Hasil Uji Regresi Secara Simultan

Hasil uji regresi secara simultan atau uji *F* dapat dilihat pada tabel IV.7 dibawah ini :

Tabel IV.7 Hasil Uji *F* Hitung

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3E+011	3	9,573E+010	2,061	,112 ^a
	Residual	4E+012	79	4,645E+010		
	Total	4E+012	82			

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Manajerial, Komite_Audit, Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: Manajemen_Laba

Sumber : Lampiran 4

- a) H_4 : **Ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.**

Pada tabel IV.7 hasil regresi menunjukkan bahwa nilai F tabel sebesar 3,956 > F hitung sebesar 2,061, dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,112 > 0,05. Maka model regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan istilah manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja memperoleh keuntungan pribadi. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgment* dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Dari hasil uji secara simultan diatas menunjukkan bahwa secara bersama-sama ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan manajerial secara signifikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa komisaris yang berasal dari luar perusahaan, keberadaan komite audit dan keselarasan tujuan manajer dengan tujuan pemegang saham tidak mempengaruhi aktivitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini.

4.3.3 Koefisien Determinasi

Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada tabel IV.8 dibawah :

Tabel IV.8 Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,269 ^a	,073	,037	215531,970	2,275

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan_Manajerial, Komite_Audit, Dewan_Komisaris

b. Dependent Variable: Manajemen_Laba

Sumber : Lampiran 4

Tabel IV.8 diatas menunjukkan nilai R sebesar 0,269, berarti hubungan keeratan secara bersama-sama antara variabel dependen dan variabel independen tidak cukup kuat karena R lebih kecil dari 0,5. Nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,073 (7,3%) artinya manajemen laba tidak dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan manajerial. Angka tersebut sangat tidak cukup kuat untuk membuktikan bahwa variable independen berpengaruh terhadap variable dependen karena berada jauh dibawah 50%. Sedangkan sisanya sebesar 92,7% dipengaruhi sebab-sebab yang lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti *financial literacy*, ukuran KAP, kepemilikan publik, *corporate secretary*, *bonus plan hypothesis*, *debt to equity hypothesis*, *political cost hypothesis*, dan error.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial) terhadap manajemen laba. Hasil penelitian terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris secara statistik t tabel sebesar $1,663 > t$ hitung sebesar $-0,209$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,835 > 0,05$ maka dapat diputuskan bahwa H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba. Hal ini disebabkan bahwa komposisi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan tidak dapat mengurangi tindakan manajemen laba.
2. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa keberadaan komite audit secara statistik t tabel sebesar $1,663 > t$ hitung sebesar $-2,450$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,016 < 0,05$ maka dapat diputuskan bahwa H2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit secara signifikan berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba. Hal ini disebabkan bahwa komite audit dinilai telah mampu meredam potensi terjadinya

kecurangan laporan keuangan sehingga mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba.

3. Hasil regresi secara parsial menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara statistik t tabel sebesar $1,663 > t$ hitung sebesar $0,215$ dan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,831 > 0,05$ maka dapat diputuskan bahwa H_3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara signifikan tidak berpengaruh terhadap aktivitas manajemen laba. Hal ini disebabkan bahwa persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar tidak bisa mengurangi masalah ketidaksiharasan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan.
4. Hasil uji regresi secara simultan atau uji F menunjukkan bahwa nilai F tabel sebesar $3,956 > F$ hitung sebesar $2,061$, dengan nilai signifikansi probabilitas sebesar $0,112 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi secara bersama-sama, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit dan kepemilikan manajerial secara signifikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Maka dapat disimpulkan bahwa komisaris yang berasal dari luar perusahaan, keberadaan komite audit dan keselarasan tujuan manajer dengan tujuan pemegang saham tidak mempengaruhi aktivitas perusahaan dalam melakukan manajemen laba pada perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran :

1. Dikarenakan pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara parsial terdapat dua variabel dinyatakan tidak berpengaruh secara signifikan, dan secara simultan variabel independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, sebaiknya menggunakan variabel yang berbeda dengan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Seperti *bonus plan hypothesis*, *debt to equity hypothesis*, *political cost hypothesis* dan faktor-faktor lainnya bukan hanya *Good Corporate Governance*.
2. Bagi perusahaan harus memperhatikan objek-objek yang digunakan yaitu komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan keselarasan tujuan manajer dengan tujuan pemegang saham karena objek tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Dengan memperhatikan objek-objek tersebut perusahaan akan lebih bisa mengontrol manajemen laba yang terjadi.
3. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dari penelitian sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an surah *Shaad* Ayat: 26
- Al-Qur'an surah *An-Nisa* ' Ayat: 29
- Al-Qur'an surah *Al-Jumu'ah* Ayat: 9-10
- Badan Pengawas Pasar Modal. 2004. Kep. 29/PM/2004. **Pembentukan dan Pedoman Kerja Komite Audit.**
- Boediono, Gideon SB. 2005. *Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur.* Makalah SNA VIII. Solo.
- Darmawati, Khomsyiah dan Rika Gelar R. 2005, *Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan.* Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Yogyakarta : Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik.
- Debora, Elizabeth, 2009, *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba pada Sektor Perbankan di Indonesia,* Skripsi Sarjana. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Ghozali Imam, Prof. Dr. H. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.* Cetakan IV, Semarang : Badan Usaha Penerbit Undip
- Indonesia, 1995. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. **Perseroan Terbatas.**
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen,* BEFE Yogyakarta
- Jensen, Michael C, dan William H. Meckling, 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Reprinted in Michael C. Jensen, *A Theory of the Firm: Governance, Residual Claims and Organizational Forms* (Harvard University Press, December 2000) available at <http://hupress.harvard.edu/catalog/JFNTHP.htm>
- Komite Kebijakan Corporate Governance, "*Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*", (Jakarta: KNKG, 2006).

- Kurniawan, Arie, 2009, *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Perusahaan Perbankan Indonesia yang Terdaftar di BEI*, Skripsi Sarjana. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Midiastuty, Pranata P, dan Mas'ud Machfoedz. 2003. *Analisa Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba*. Makalah SNA VI. Surabaya.
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan, 2007, *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Makalah SNA X. Makasar.
- Nursalim, Drs, M.Pd. 2002. *Pengantar Kemampuan Berbahasa Indonesia*. Pekanbaru: Susqa Press.
- Pranata, Yudha. 2007. *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan*, Skripsi Sarjana. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Prasetyantoko A, Dr. 2008. *Corporate Governance Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT. GRAMEDIA PUSTAKA UTAMA.
- Puspita, Nani. 2009. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI))*, Skripsi Sarjana. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Sri Wardani. 2006. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Earnings Management pada Perusahaan IPO di Bursa Efek Jakarta*, Skripsi Sarjana. Pekanbaru : Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Tarjo. 2008. *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage Terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta Cost Of Equity Capital*. Makalah SNA XI. Pontianak
- Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang. 2007. *Mekanisme Corporate Governance. Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*. Makalah SNA X. Makasar.
- Utama, Siddharta dan Cynthia Afriani, 2005, *Praktek Corporate Governance dan Penciptaan Nilai Perusahaan: Studi Empiris di BEI*, Usahawan No. 08 Thn. XXXIV

- Veronica, Sylvia, dan Siddharta Utama. 2005. *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earning Management)*. Makalah SNA VIII. Solo.
- Wardani, Diah Kusuma. 2008. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Wedari, Linda Kusumaning. 2004. *Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris, dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba*. Makalah SNA VII. Denpasar.